

**TESIS**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
PENYERAPAN ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN TORAJA UTARA**

*ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE ADOPTION OF THE REGIONAL  
GOVERNMENT BUDGET NORTH TORAJA DISTRICT*

**Disusun dan diajukan oleh:**

**JEMI DUMA  
A042182012**



**Kepada**

**PROGRAM STUDI  
MAGISTER MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
2020**



Optimization Software:  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

# TESIS

## ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

disusun dan diajukan oleh :

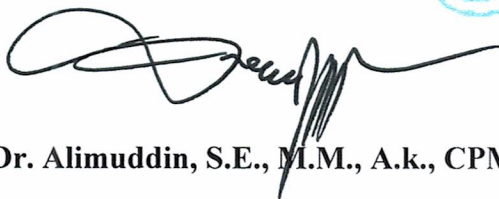
**JEMI DUMA**  
**A042182012**

telah dipertahankan dalam sidang ujian tesis  
Pada tanggal 23 September 2020 dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Komisi Penasehat,

Ketua

Anggota



**Dr. Alimuddin, S.E., M.M., A.k., CPMA**

Ketua Program Studi  
Magister Keuangan Daerah




**Dr. Aini Indrijawati, S.E., M.Si., C.A.**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



**Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si.**



**Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si.**



## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jemi Duma  
NIM : A042182012  
Program Studi : Magister Keuangan Daerah

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul

### **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, September 2020  
Yang membuat pernyataan,



**Jemi Duma**



## PRAKATA

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A, Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan pada Jenjang Magister pada Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah menerima penulis untuk mengikuti kuliah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
3. Dr. Alimuddin, SE., MM., CMA dan Dr. Aini Indrajawati, SE., Ak., M.Si., CA, Pembimbing Utama dan Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga selama penulis menyusun tesis ini.
4. Dr. Kalatiku Paembonan, SE., M.Si, Bupati Toraja Utara yang telah memberikan ijin dan dukungan moril dan materil kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan jenjang Magister pada Program Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
5. Dr. Mursalim Nohong, SE., M.Si, Ketua Program Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah meluangkan waktu, kesempatan dan senantiasa mendukung kesuksesan dan penyelesaian tesis ini.

atmawati, SE., M.S, Dr. Nirwana, SE., Ak., M.Si.,CA, dan Dr. Jumidah, M.Si., Tim Penilai Tesis yang telah memberikan arahan dan masukan



selama ujian dan proses penyelesaian tesis ini.

7. Teman-teman Kuliah Program Magister Keuangan Daerah kelas Kabupaten Toraja Utara dan Tana Toraja yang senantiasa bersama sejak perkuliahan, penulisan proposal, dan penyelesaian tesis ini.
8. Terkhusus kepada keluarga penulis yang selama mengikuti pendidikan tersita waktu dan perhatiannya.

Penulis

Jemi Duma



## ABSTRAK

**JEMI DUMA.** Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Dibimbing oleh Alimuddin dan Aini Indrajawati)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan anggaran, regulasi, kompetensi sumber daya manusia, dokumen pengadaan, uang persediaan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran terhadap kualitas LKPD Kabupaten Toraja Utara.

Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner diajukan kepada 36 responden yang terdiri dari bendahara OPD Pemerintah Kabupaten Toraja Utara. Kuesioner diukur menggunakan skala likert. Data penelitian diolah dengan menggunakan program SPSS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbaikan dokumen perencanaan akan meningkatkan penyerapan anggaran pemerintah daerah demikian pula sebaliknya penurunan dokumen perencanaan akan menurunkan penyerapan anggaran pemerintah daerah. Perbaikan regulasi akan meningkatkan penyerapan anggaran pemerintah daerah demikian pula sebaliknya penurunan regulasi akan menurunkan penyerapan anggaran pemerintah daerah. Peningkatan kompetensi akan meningkatkan penyerapan anggaran pemerintah daerah demikian pula sebaliknya penurunan kompetensi akan menurunkan penyerapan anggaran pemerintah daerah. Perbaikan dokumen pengadaan akan meningkatkan penyerapan anggaran pemerintah daerah demikian pula sebaliknya penurunan dokumen pengadaan akan menurunkan penyerapan anggaran pemerintah daerah. Peningkatan uang persediaan akan meningkatkan penyerapan anggaran pemerintah daerah demikian pula sebaliknya penurunan uang persediaan akan menurunkan penyerapan anggaran pemerintah daerah.

Kata Kunci: Anggaran, Kompetensi, Kualitas, Pemerintah Daerah.



## ABSTRACT

JEMI DUMA. Analysis of Factors Affecting the Absorption of Local Government Budget in North Toraja Regency (Supervised by Alimuddin and Aini Indrajawati)

This study aims to analyze budget planning, regulations, human resource competence, procurement documents, supply money, and influence the absorption of the budget on the quality of LKPD in the North Toraja Regency.

Data were collected using a questionnaire. The questionnaire was submitted to 36 respondents consisting of OPD treasurers of the North Toraja Regency Government. The questionnaire was measured using a Likert scale. The research data were processed using the SPSS program.

The results showed that improving planning documents would increase regional government budget absorption and vice versa, decreasing planning documents would reduce regional government budget absorption. Improved regulations will increase the absorption of regional government budgets and vice versa, decreasing regulations will reduce the absorption of local government budgets. Increasing competence will increase the absorption of regional government budgets and vice versa, decreasing competence will reduce the absorption of local government budgets. Improvement of procurement documents will increase the absorption of local government budgets and vice versa, decreasing procurement documents will reduce the absorption of local government budgets. An increase in supply money will increase the absorption of the regional government budget and vice versa, a decrease in supply money will reduce the absorption of the regional government budget.

Keywords: Budget, Competence, Quality, Local Government.



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>197106192000031001PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II</b> .....	<b>8</b>
2.1 Tinjauan Teoritis .....	8
2.1.1 Teori Stakeholder.....	8
2.1.2 Anggaran Tradisional.....	9
2.1.3 Anggaran Publik Dengan Pendekatan NPM (New Public Management) .....	10
2.1.4 Institutional Isomorphism .....	13
2.1.5 Teori Perilaku Rencanan (Theory of Planned Behaviour) .....	15
2.1.6 Penyerapan Anggaran .....	16
2.1.7 Sistem Penganggaran Daerah.....	17
2.1.8 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran .....	19
2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya .....	24
<b>BAB III</b> .....	<b>26</b>
3.1 Kerangka Pemikiran.....	26
Hipotesis .....	28
Perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran.....	28
Faktor Regulasi terhadap Penyerapan Anggaran .....	30





3.2.3. Kompetensi SDM terhadap Penyerapan Anggaran .....	31
3.2.4. Dokumen Pengadaan terhadap Penyerapan Anggaran .....	32
3.2.5. Uang Persediaan terhadap Penyerapan Anggaran .....	33
<b>BAB IV .....</b>	<b>35</b>
4.1 Rancangan Penelitian.....	35
4.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	35
4.3 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel.....	35
4.4 Jenis dan Sumber Data.....	36
4.5 Metode Pengumpulan Data.....	36
4.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	36
4.7 Teknik Analisis Data.....	38
4.7.1 Uji Validitas .....	39
4.7.2 Uji Reliabilitas .....	39
4.7.3 Analisis Regresi Berganda.....	39
4.7.4 Uji Asumsi Klasik.....	42
<b>BAB V .....</b>	<b>43</b>
5.1 Uji Validitas dan Reliabilitas .....	43
5.2 Karakteristik Responden.....	46
5.3 Deskripsi Variabel Penelitian.....	50
5.4 Uji Analisis Regresi Linear Berganda .....	65
5.5 Pengujian Hipotesis .....	71
<b>BAB VI .....</b>	<b>82</b>
6.1 Pengaruh Dokumen Perencanaan Terhadap Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah .....	82
6.2 Pengaruh Regulasi Terhadap Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah .....	84
6.3 Pengaruh Dokumen Pengadaan Terhadap Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah .....	88
6.4 Pengaruh Uang Persediaan terhadap Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah .....	92
<b>BAB VII.....</b>	<b>95</b>
7.1. Simpulan.....	95
7.2 Keterbasan penelitian.....	96
7.3 Saran.....	96
<b>R PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	37
--	----



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Kerangka Pemikiran.....	27
-------------------------------------	----



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada organisasi sektor publik seperti pemerintah, anggaran merupakan instrumen penting dalam menjalankan organisasi. Selain itu, anggaran merupakan proses mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas (Kenis, 1979). Secara detail (Mardiasmo 2002:65) mengemukakan bahwa anggaran adalah instrumen pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk menilai kinerja organisasi sektor publik. Kekeliruan manajemen anggaran dalam pemerintahan daerah berdampak luas terhadap proses pembangunan daerah. Anggaran harus didasarkan pada pendekatan kinerja yang fokus terhadap penciptaan efisiensi dan efektivitas rencana kerja unit-unit dalam pemerintahan.

Menurut Wadi dkk., (2016) meski prinsip anggaran berbasis kinerja, tidak memprioritaskan penyerapan anggaran, namun pemerintah daerah tidak dapat mengecualikan anggaran belanja yang merupakan fungsi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengeluaran pemerintah baik pusat maupun daerah merupakan instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Variabel dominan yang mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah adalah konsumsi pemerintah. Jadi pengeluaran pemerintah merupakan salah satu faktor penentu yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (Yustika, 2012).

Penyerapan anggaran yang lambat menjadi isu penting beberapa tahun ini (lihat Wadi dkk., 2016). Penyerapan anggaran yang lambat



menunjukkan kurangnya efektivitas pemerintah dalam pemanfaatan anggaran, yang berimplikasi terhadap pengelolaan kas. Lebih lanjut, Susanto (2006) menyatakan bahwa ketika penyerapan anggaran gagal memenuhi target, berarti terjadi inefisiensi dan ketidakefektifan dalam alokasi anggaran. Secara umum, ada dua pihak yang terlibat dalam proses penyerapan anggaran yaitu pengguna anggaran dan bendahara umum instansi (Murtini, 2009). Dalam melaksanakan tugas fungsionalnya, pemerintah daerah sebagai pengguna anggaran, mendelegasikan kepada satuan kerja dalam ruang lingkup dibawahnya.

Menurut Sinaga (2016) rendahnya penyerapan anggaran mengakibatkan hilangnya manfaat belanja, karena dana yang dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan. Apabila pengalokasian anggaran efisien, maka keterbatasan sumber dana yang dimiliki negara dapat dioptimalkan untuk mendanai kegiatan strategis. Sumber-sumber penerimaan daerah yang terbatas mengharuskan pemerintah menyusun prioritas kegiatan dan pengalokasian anggaran yang efektif dan efisien. Ketika penyerapan anggaran gagal memenuhi target, berarti telah terjadi inefisiensi dan inefektivitas pengalokasian anggaran.

Rendahnya penyerapan anggaran perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah terutama untuk jenis belanja barang dan belanja modal. Belanja tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, peningkatan kemakmuran nyata dan terwujudnya stabilitas makroekonomi (Anfujatin, 2016).

penelitian seperti (Herriyanto, 2012; Wadi dkk., 2016; Sinaga, 2016) akan faktor penentu yang mempengaruhi penyerapan anggaran satuan



kerja daerah antara lain, perencanaan anggaran, persoalan internal unit kerja, persoalan mekanisme pengadaan barang dan jasa, dokumen perencanaan, mekanisme uang beredar, perubahan uang beredar, sumber daya manusia, standar prosedur operasional dan evaluasi kinerja yang belum diterapkan dengan baik di satuan kerja internal.

Perencanaan anggaran menentukan kualitas penyerapan anggaran satuan kerja daerah (Anfujatin, 2016). Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah daerah. Namun dalam kenyataannya seringkali target yang ditentukan oleh satuan kerja tidak akurat bahkan tidak dilaporkan perencanaannya. Perencanaan anggaran yang kurang baik dengan tidak menyusun skala prioritas akan menyebabkan lambatnya penyerapan anggaran.

Regulasi cukup berperan penting dalam menentukan kualitas penyerapan anggaran. Pengetahuan terkait regulasi yang berlaku dapat menerapkan praktik terbaik dalam pelaksanaan anggaran (Al Weshah, 2013) dan pemahaman mengenai mekanisme regulasi yang kurang dapat menghambat penyerapan anggaran (Kuswoyo 2011).

Temuan Bappenas (2011:13) terkait penyerapan anggaran di daerah menyatakan bahwa minat dan kompetensi sumber daya manusia pada satuan kerja sangat menentukan penyerapan anggaran daerah. Beberapa permasalahan penyerapan anggaran di daerah disebabkan antara lain rendahnya minat untuk

pejabat pengadaan barang dan jasa, terbatasnya pegawai yang mempunyai pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi persyaratan, rendahnya



kompetensi sumber daya manusia sehingga sering terjadi kesalahan di satuan kerja dalam melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), terutama pada saat efisiensi/penghematan anggaran harus dilakukan.

Selain itu, beberapa faktor penting yang mempengaruhi penyerapan anggaran adalah dokumen pengadaan dan terbatasnya uang persediaan. Menurut Wadi dkk. (2016), Pengadaan barang dan jasa pemerintah (pekerjaan kontrak) yang melibatkan sektor swasta adalah masalah yang dapat dianggap inheren dalam fenomena keterlambatan penyerapan anggaran, terutama dokumen pengadaan dengan mekanisme tender. Meskipun regulasi terkait dengan dokumen pengadaan barang dan jasa telah direvisi beberapa kali, hingga saat ini dokumen pengadaan barang dan jasa tetap menjadi arus utama masalah dalam penyerapan anggaran. Sementara itu, terbatasnya uang persediaan pada satuan kerja daerah disebabkan keterlambatan dalam kegiatan yang harus dilakukan karena jumlah uang persediaan, sebagai kas perbendaharaan, tidak bisa untuk meliput beberapa kegiatan sekaligus. Situasi tersebut sering dialami oleh para pelaksana kegiatan karena kendala anggaran yang ada di kas untuk melakukan kegiatan.

Menurut laporan realisasi APBD Toraja Utara pada tahun 2017 hingga 2019 per bulan juni, penyerapan anggaran SKPD belum sepenuhnya mencapai 100 persen. Pada tahun 2017 tercatat penyerapan anggaran mencapai 76,3 persen. Pada tahun 2018 penyerapan anggaran mencapai 89,41 persen, lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2019 triwulan II, penyerapan anggaran

hanya mencapai 29,26 persen. Lambatnya penyerapan anggaran pada triwulan II, akan menyebabkan penumpukan anggaran pada akhir tahun. Hal ini



akan berdampak terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan daerah.

Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai lambatnya penyerapan anggaran di satuan kerja Kabupaten Toraja Utara. Diperoleh informasi awal bahwa pola belanja satuan kerja daerah belum merata, dengan kata lain dimungkinkan terjadi penumpukan anggaran pada akhir tahun. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya oleh Herriyanto (2012). Perbedaan dengan penelitian sebelumnya karena terjadi perubahan sumber daya manusia pada satuan kerja terkait jumlah maupun kompetensi. Jumlah sumber daya manusia pada satuan kerja pada tahun 2012 mencapai 30 orang, meningkat menjadi 60 orang pada tahun 2018. Sementara itu, untuk kompetensi jumlah pegawai yang memiliki sertifikat kompetensi pada tahun 2012 tercatat sebesar 25 orang, meningkat menjadi 40 orang pada tahun 2018.

Penelitian yang dilakukan oleh Herriyanto dilakukan pada organisasi kementerian/lembaga dengan lingkup yang lebih besar dibandingkan dengan organisasi pemerintah daerah. Perbedaan lainnya adalah penelitian ini menambahkan variabel regulasi sebagai salah satu faktor determinan dalam penyerapan anggaran.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana perencanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara?





- 2) Apakah regulasi berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara?
- 3) Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara?
- 4) Apakah dokumen pengadaan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara?
- 5) Apakah uang persediaan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui apakah perencanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.
- 2) Untuk mengetahui apakah regulasi berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.
- 3) Untuk mengetahui apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.
- 4) Untuk mengetahui apakah dokumen pengadaan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.
- 5) Untuk mengetahui apakah uang persediaan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

at praktis, hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan  
ngsih dalam rangka mengevaluasi kinerja pemerintah daerah Kabupaten



Toraja Utara terutama kaitannya dengan perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan dalam rangka memaksimalkan penyerapan anggaran.

- 2) Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam hal pengembangan wawasan di bidang anggaran pemerintah daerah serta dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu akademik dan dapat dijadikan referensi atau bukti tambahan untuk peneliti-peneliti selanjutnya yang meneliti tentang topik yang sama.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Teoritis

##### 2.1.1 Teori Stakeholder

Pengertian *stakeholder* menurut Freeman dan Reed (1983) adalah sekelompok orang atau individu yang diidentifikasi dapat mempengaruhi dan dapat dipengaruhi oleh suatu tujuan pencapaian tertentu. Para pemegang saham, para *supplier*, bank, para *customer*, pemerintah dan komunitas memegang peranan penting dalam organisasi (berperan sebagai *stakeholder*). Pemerintahan merupakan bagian dari beberapa elemen yang membentuk masyarakat dalam sistem sosial yang berlaku. Keadaan tersebut kemudian menciptakan sebuah hubungan timbal balik antara pemerintah dan para *stakeholder* yang berarti pemerintah harus melaksanakan peranannya secara dua arah untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan sendiri maupun *stakeholder* lainnya dalam sebuah sistem sosial. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dihasilkan dan dilakukan oleh masing-masing bagian dari *stakeholder* saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya.

Sejalan dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pemerintah sebagai *stakeholder* yang memiliki peran penting dalam proses memajukan suatu daerah, pemerintah diharapkan mampu untuk melakukan upaya pembangunan secara maksimal. Kemajuan suatu daerah dilihat dari bagaimana pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi suatu daerah harus mampu

a anggaran yang ada untuk kepentingan rakyat didaerahnya. Kepentingan yang dimaksudkan disini adalah bagaimana anggaran yang telah disahkan



tersebut memang merupakan representasi dari apa yang diinginkan oleh rakyat sehingga hasilnya akan kembali kepada rakyat itu juga nantinya. Pelayanan, strategi, dan operasi dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang terjadi di daerah tersebut menjadi tanggung jawab bersama antar Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) sebagai *stakeholder* pemerintah daerah. Hal tersebut dapat tercermin dalam proses penggunaan anggaran yang efektif dan efisien sehingga tidak menyebabkan penyerapan realisasi yang rendah.

### 2.1.2 Anggaran Tradisional

Dua ciri utama dalam pendekatan ini adalah a) cara penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan *incrementalism*; dan b) struktur dan susunan anggaran yang bersifat *line item*. Ciri lain yang melekat pada pendekatan ini adalah; cenderung sentralistis; bersifat spesifikasi; tahunan dan menggunakan prinsip anggaran bruto (lihat Syarifuddin, 2003).

#### 1. Incrementalism

Penekanan dan tujuan utama pendekatan tradisional adalah pada pengawasan dan pertanggungjawaban yang terpusat. Anggaran tradisional bersifat *incrementalism*, yaitu hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah dalam item-item anggaran yang sudah ada sebelumnya dengan menggunakan data tahun sebelumnya sebagai dasar untuk menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan tanpa dilakukan kajian yang mendalam. Masalah utama dalam anggaran tradisional adalah terkait dengan tidak adanya perhatian terhadap

o *value for money*, konsep ekonomi, efisiensi dan efektivitas seringkali dijadikan pertimbangan dalam penyusunan anggaran tradisional. Anggaran



tradisional yang bersifat “incrementalism” cenderung menerima konsep harga pokok pelayanan historis tanpa memperhatikan berbagai pertanyaan. Akibat digunakannya harga pokok pelayanan historis adalah suatu item, program, atau kegiatan muncul lagi dalam anggaran tahun berikutnya meskipun sebenarnya item tersebut sudah tidak dibutuhkan (lihat Syarifuddin, 2003).

## 2. Line Item

Ciri lain anggaran tradisional adalah struktur anggaran bersifat *line item* yang didasarkan atas dasar sifat (*nature*) dari penerimaan dan pengeluaran. Metode *line item budget* tidak memungkinkan untuk menghilangkan item-item penerimaan atau pengeluaran yang telah ada struktur anggaran, walaupun sebenarnya secara riil item tertentu sudah tidak relevan lagi untuk digunakan pada periode sekarang. Karena sifatnya yang demikian, penggunaan anggaran tradisional tidak memungkinkan untuk dilakukan penilaian kinerja secara akurat. Penyusunan anggaran secara *line item* dilandasi alasan adanya orientasi sistem anggaran yang dimaksudkan untuk mengontrol pengeluaran (lihat Syarifuddin, 2003).

### 2.1.3 Anggaran Publik Dengan Pendekatan NPM (New Public Management)

Perubahan manajemen sektor publik mengalami perubahan drastis sejak pertengahan tahun 1980an dari sistem model tradisional menjadi model manajemen. Model manajemen sektor publik yang terkesan fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. Paradigma baru yang muncul dalam manajemen sektor

kenal dengan pendekatan *New Public Management* (NPM). Pendekatan fokus pada orientasi kinerja bukan pada orientasi kebijakan. Menurut



Syarifuddin (2003) salah satu model pemerintahan di era NPM adalah model pemerintahan yang diajukan oleh Osborne dan Gabler (1995). Perspektif baru pemerintah menurut Osborne dan Gabler adalah:

a. Pemerintahan Katalis

Fokus pada pemberian pengarahan bukan produksi pelayanan publik. Pemerintah harus menyediakan beragam pelayanan publik, tetapi tidak harus terlibat secara langsung dengan proses produksinya. Sebaiknya pemerintah memfokuskan diri pada pemberian arahan, sedangkan produksi pelayanan publik diserahkan pada pihak swasta dan/atau sektor ke tiga (lembaga swadaya masyarakat dan nonprofit lainnya).

b. Pemerintah Milik Masyarakat

Memberdayakan masyarakat daripada melayani. Pemerintah sebaiknya memberikan wewenang kepada masyarakat sehingga mereka mampu menjadi masyarakat yang dapat menolong dirinya sendiri (*self help community*).

c. Pemerintah Yang Kompetitif

Menyuntikkan semangat kompetisi dalam pemberian pelayanan publik. Kompetisi adalah satu-satunya cara untuk menghemat biaya sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan kompetisi, banyak pelayanan publik yang dapat ditingkatkan kualitasnya tanpa harus memperbesar biaya.

d. Pemerintah Digerakkan Oleh Visi

Mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan menjadi organisasi yang

digerakkan oleh misi.



e. Pemerintah Yang Berorientasi Hasil

Membiayai hasil bukan masukan. Pada pemerintah tradisional, besarnya alokasi anggaran pada suatu unit kerja ditentukan oleh kompleksitas masalah yang dihadapi.

f. Pemerintah Berorientasi Pada Pelanggan

Memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi. Pemerintah berorientasi pelanggan mengidentifikasi pelanggan sesungguhnya, menciptakan sistem pertanggungjawaban ganda (*dual accountability*) kepada legislatif dan masyarakat.

g. Pemerintah Wirausaha

Mampu menciptakan pendapatan dan tidak sekedar membelanjakan. Pemerintah daerah wirausaha dapat mengembangkan beberapa pusat pendapatan, misalnya BPS dan Bappeda, yang dapat menjual informasi tentang daerahnya kepada pusat-pusat penelitian, pemberian hak guna usaha yang menarik kepada pengusaha dan masyarakat, penyertaan modal, dan lain-lain.

h. Pemerintah Antisipatif

Berupaya mencegah daripada mengobati. Pemerintah tradisional yang birokratis memusatkan diri pada produksi pelayanan publik untuk memecahkan masalah publik. Pemerintah wirausaha tidak reaktif tapi proaktif la tidak hanya mencoba untuk mencegah masalah, tetapi juga berupaya keras untuk mengantisipasi masa depan.





i. Pemerintah Desentralisasi

Dari hierarki menuju partisipatif dan tim kerja. Pada pemerintah desentralisasi pengambilan keputusan bergeser ketangan masyarakat, asosiasi-asosiasi, pelanggan, dan lembaga swadaya masyarakat.

j. Pemerintah Berorientasi Pada (Mekanisme) Pasar

Mengadakan perubahan dengan mekanisme pasar (sistem insentif) dan bukan dengan mekanisme administratif (sistem prosedur dan pemaksaan). Pemerintah wirausaha tidak memaintahkan dan mengawasi tetapi mengembangkan dan menggunakan sistem insentif agar orang tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan masyarakat.

#### 2.1.4 Institutional Isomorphism

Studi tentang pengukuran kinerja di dalam organisasi pemerintahan muncul sebagai akibat dari kehadiran reformasi di sektor publik. Oleh karena itu, sangat tepat jika merujuk pada konsep *isomorphism* (Pilcher, 2007). Konsep ini menggambarkan sebuah proses homogenisasi organisasi dalam sebuah lingkungan tertentu (DiMaggio dan Powell, 1983). Definisi *isomorphism* adalah: "*is a constraining process that forces one unit in a population to resemble other units that face the same set of environmental conditions*" (DiMaggio dan Powell, 1983).

Ada dua tipe *isomorphism*, yaitu *competitive isomorphism* dan *institutional isomorphism*. Yang pertama berhubungan dengan kompetisi pasar dan yang kedua berhubungan dengan sebuah situasi di mana sebuah organisasi juga harus

etisi untuk mendapatkan dukungan politik dan legitimasi kelembagaan.

ni membahas konsep yang kedua karena organisasi pemerintah tidak



berada dalam kompetisi pasar yang bebas dan terbuka sepenuhnya. Ada tiga tipe isomorphism, yaitu: (1) *coercive isomorphism*, yang muncul sebagai akibat dari pengaruh tekanan kekuatan politik guna memperoleh legitimasi bagi sebuah organisasi, (2) *mimetic isomorphism*, yang merupakan reaksi organisasi atas ketidakpastian yang hadir di lingkungan tempatnya beroperasi, dan (3) *normative isomorphism*, yang diasosiasikan dengan proses homogenisasi organisasi melalui proses pendidikan dan asosiasi organisasi profesional (Akbar, 2012).

Menurut Akbar (2012) penggunaan pengukuran kinerja dalam organisasi pemerintah bergantung pada tarik-menarik kekuatan antarkonstituennya. Misalnya, sangat mungkin sekali bahwa pelaksanaan pengukuran kinerja dan penyusunan LAKIP di daerah dilakukan karena adanya rasa ketergantungan kepada pemerintah pusat, terutama berkaitan dengan alokasi dana APBD. Dalam konteks inilah *coercive isomorphism* kemungkinan besar hadir dalam tata kelola organisasi pemerintahan di Indonesia.

Mengingat kemampuan sumber daya manusia pemerintah, terutama di daerah, yang umumnya masih relatif rendah, pada saat ini sudah muncul kecenderungan yang baik dari pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai jalur. Berbagai pelatihan teknis nongelar sampai dengan jalur akademik bergelar (diploma, strata satu dan magister) telah digunakan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. DiMaggio dan Powell (1983) menyatakan bahwa semakin berpendidikan SDM yang dimiliki

di, semakin besar kemungkinan organisasi tersebut menjadi mirip satu dalam hal praktik manajemen.



### 2.1.5 Teori Perilaku Rencanaan (Theory of Planned Behaviour)

Teori perilaku rencanaan (untuk selanjutnya disebut TPR) merupakan perluasan dari teori tindakan bernalar (*theory of reasoned action*) yang dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen (1975:58). TPR mengakomodasi satu variabel baru yang tidak terdapat pada teori tindakan bernalar (TTB). Variabel tersebut adalah kontrol perilaku persepsian (*perceived behavioral control*). Asumsi dalam TPR juga merupakan asumsi dalam TTB adalah orang memilih serangkaian tindakannya secara rasional. Menurut TTB/TPR, perilaku diyakini sebagai hasil dari niat berperilaku (*behavioral intentions*). Niat didefinisi sebagai probabilitas subjektif individu dalam menentukan pilihan atas berbagai alternatif berperilaku.

Selanjutnya, menurut TTB/TPR, niat individu untuk melakukan perilaku ditentukan oleh tiga faktor yang masing-masing bersifat independen (Ajzen 1985:1991). Faktor pertama adalah sikap terhadap perilaku (*attitude towards the behavior*). Sikap terhadap perilaku merupakan konstruk yang menggabungkan keyakinan seseorang tentang kemungkinan outcome tertentu dari hasil perilaku (disebut juga sebagai keyakinan perilaku) dan evaluasi secara menyeluruh oleh seseorang atas outcome tersebut. Menurut TTB/TPR, individu yang meyakini pelaksanaan perilaku tertentu menyebabkan *outcome* positif, maka ia akan mempunyai sikap yang mendukung pelaksanaan perilaku tersebut (lihat Nurofik, 2013).

Faktor kedua adalah norma subyektif (*subjective norm*). Norma subyektif

akan keyakinan individu terhadap tekanan sosial untuk melakukan atau melakukan perilaku (disebut juga sebagai keyakinan normatif). Norma



subyektif merupakan konstruk yang menggabungkan keyakinan individu terhadap referents tertentu dan motivasi seseorang untuk patuh kepada referentsnya. Semakin tinggi keyakinan seseorang bahwa referennya menghendaki suatu perilaku tertentu dan semakin tinggi kepatuhan orang tersebut terhadap referennya, maka semakin tinggi kecenderungan orang tersebut untuk melakukan perilaku tertentu.

Faktor ketiga dan merupakan variabel yang ditambahkan dari teori tindakan bernalar adalah kontrol perilaku persepsian (*perceived behavioral control*). Kontrol perilaku persepsian didefinisikan sebagai keyakinan seseorang tentang tingkat kesulitan/kemudahan dalam melakukan perilaku (disebut juga sebagai keyakinan kontrol) (Ajzen, 1991) atau tingkat kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melaksanakan perilaku (Carpenter dan Reimers, 2005). Semakin tinggi tingkat kewenangan yang dimiliki seseorang untuk melakukan perilaku tertentu, maka semakin mudah bagi orang tersebut untuk melakukannya.

### **2.1.6 Penyerapan Anggaran**

Penyerapan anggaran merupakan salah satu tahapan dari siklus anggaran yang dimulai dari perencanaan anggaran, penetapan dan pengesahan anggaran, penyerapan anggaran, pengawasan anggaran dan pertanggungjawaban penyerapan anggaran. Di tingkat daerah, penetapan dan pengesahan anggaran dilaksanakan oleh DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, tahapan penyerapan dimulai ketika Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD disahkan oleh DPRD (Zulaikah dan Burhany, 2019).

Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran, yang berhasil dicapai. Penilaian kinerja dilakukan dengan menganalisis kinerja aktual dengan yang dianggarkan (Mardiasmo, 2009). Dalam



teori ekonomi makro, belanja pemerintah merupakan salah satu elemen untuk menjaga pertumbuhan ekonomi suatu negara. Belanja pemerintah, khususnya belanja barang dan jasa, merupakan salah satu komponen utama yang membentuk Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product* (GDP). PDB dibentuk melalui unsur-unsur pengeluaran konsumsi rumah tangga, investasi, ekspor netto (ekspor-impor) dan belanja pemerintah. Semakin besar keuangan negara yang dibelanjakan, maka semakin besar porsi pemerintah dalam membentuk PDB, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sendiri terbentuk dari peningkatan jumlah PDB. Pertumbuhan ekonomi dihitung dari peningkatan PDB tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menjadi salah satu indikator tingkat keberhasilan pembangunan bidang ekonomi.

Penyerapan anggaran, khususnya belanja barang dan jasa, memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk itu setiap instansi pemerintah harus mengatur pengeluarannya agar berjalan lancar dan dapat mendukung keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Namun demikian penyerapan anggaran tidak diharuskan mencapai 100 persen, tetapi penyerapan anggaran diharapkan mampu memenuhi setidaknya lebih dari 80 persen anggaran yang telah ditetapkan. Tinggi rendahnya penyerapan anggaran dalam suatu SKPD menjadi tolak ukur kinerja dari SKPD tersebut (Zulaikah dan Burhany, 2019).

### 2.1.7 Sistem Penganggaran Daerah



Langkah pertama adalah perencanaan dan penganggaran daerah. Perencanaan penganggaran daerah merupakan cermin dari efektifitas pengelolaan keuangan

daerah yang baik untuk menunjang keberhasilan desentralisasi fiskal. Proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun.

Setelah RPJMD ditetapkan, pemerintah daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah. Kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD. Rancangan kebijakan Umum APBD yang telah dibahas kepala daerah bersama DPRD, selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA). Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang disampaikan oleh kepala daerah. Kemudian Kepala daerah menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD sebagai pedoman kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan nota kesepakatan. Setelah RKA-SKPD dibuat, selanjutnya adalah menyusun rencana peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Rencana peraturan tersebut akan dievaluasi kemudian ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan

ntang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD (lihat  
rian Keuangan, 2017).



## 2.1.8 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran

### 1. Perencanaan Anggaran

Menurut Halim (2014:91) penyerapan anggaran yang maksimal diikuti dengan perencanaan anggaran yang baik. Penyerapan anggaran yang maksimal tanpa adanya perencanaan anggaran yang baik dapat dikatakan sebagai suatu hal yang mustahil terwujud. Perencanaan anggaran bermula dari pengajuan awal yang dilakukan kementerian dan lembaga yang kemudian bermuara dalam RKA-KL. Pembahasan dan penganggaran yang dilakukan dapat dikatakan merupakan proses yang berulang terus menerus dalam tahapannya, walaupun mungkin berbeda dalam program dan pelaksanaannya.

Program yang direncanakan harusnya bersifat komprehensif dan simultan, dimana setiap program telah melalui suatu pembahasan dan perencanaan terlebih dahulu sebelum masuk dalam penganggaran (Mantiri dkk., 2018). Suatu program diharapkan dapat diselesaikan dengan baik dalam satu tahun anggaran, kecuali dinyatakan bahwa program tersebut memakan waktu dan anggaran lebih dari satu tahun (*multiple years*). Makin banyak program yang dilaksanakan dalam satu periode anggaran maka akan meningkatkan penyerapan anggaran dalam satu organisasi, kementerian atau lembaga. Sehingga dapat dikatakan secara kinerja anggaran penyerapannya mendekati maksimal.

Dasar hukum penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah

pada beberapa produk perundang-undangan sebagai berikut: (1) Undang-Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (2) Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,



Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

## **2. Regulasi**

Regulasi diperlukan untuk efektivitas implementasi dan pelaksanaan anggaran (Love dkk., 2008). Regulasi memungkinkan manajer publik mengatur kegiatan dengan menggunakan sistem pemantauan, pengawasan, dan penegakan hukum. Suatu kegiatan harus diketahui dan dipahami dengan cara tertentu yang akan diatur (Short, 2013). Oleh karena itu, regulasi merupakan peraturan yang diberlakukan untuk memberikan kemudahan dalam pembuatan keputusan dan pelaksanaan anggaran yang akan berdampak langsung terhadap penyerapan anggaran.

## **3. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)/Aparatur Sipil Negara (ASN)**

Salah satu faktor utama yang menentukan baik atau tidak jalannya roda pemerintahan ini adalah sumber daya manusia. Hal ini terlihat dari bagaimana manusia sebagai tenaga kerja menggunakan potensi fisik dan psikis yang ia miliki secara maksimal dalam mencapai tujuan organisasi (lembaga). SDM sebagai tenaga pelaksana anggaran terlihat pada fungsi manusia sebagai satuan yang memiliki tugas salah satunya sebagai panitia pengadaan barang dan jasa





yang harus memahami dengan baik tata cara dan prosedur teknis pengadaan barang dan jasa. Sehingga kompetensi SDM menjadi salah satu faktor yang ingin diuji dengan item pembentuk faktor diantaranya adalah SDM pelaksana pengadaan barang dan jasa kurang kompeten, panitia pengadaan barang dan jasa melaksanakan tugas lebih dari satu (rangkap tugas), keterbatasan pejabat atau pelaksana pengadaan barang dan jasa yang bersertifikat.

Menurut Nawawi (2001) ada tiga pengertian SDM yaitu: (1) Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja dilingkungan suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pekerja atau karyawan); (2) Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya; (3) Sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal (*non material/non finansial*) di dalam organisasi bisnis, yang dapat mewujudkan menjadi potensi nyata (*real*) secara fisik dan *non*-fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.

Pengaruh yang ditimbulkan oleh pengelolaan anggaran dan SDM yang salah sangat banyak seperti contohnya pada aspek ekonomi, dimana karena adanya kesalahan pengelolaan anggaran dan penetapan SDM yang salah maka kualitas dari pelayanan menurun. Dalam hal ini proses perekonomian Indonesia lambat karena ketidakmampuan SDM dalam mengelola dengan baik. Di era globalisasi ini tentunya Pemerintah Indonesia sangat membutuhkan SDM yang mampu mengelola anggaran dengan baik. KKN merupakan sebuah penyakit yang krusial yang sangat-

membunuh perekonomian Indonesia. SDA yang melimpah tidak bisa dikelola dengan baik oleh aparat pemerintah karena kualitasnya kurang. Kualitas



SDM yang rendah juga membuat sebuah proses yang lambat dalam pelayanan administrasi, contohnya dalam mengurus izin usaha.

#### **4. Dokumen Pengadaan**

Berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, jenis dokumen pengadaan terdiri dari dokumen pengadaan barang atau jasa pemborongan atau jasa lainnya dan dokumen pengadaan jasa konsultansi. Dokumen pengadaan barang atau jasa pemborongan atau jasa lainnya terdiri dari dokumen pemilihan penyedia dan dokumen pasca atau prakualifikasi. Sedangkan dokumen pengadaan jasa konsultansi terdiri dari dokumen pemilihan penyedia dan dokumen prakualifikasi.

Informasi yang diperlukan dalam penyusunan dokumen (Herriyanto, 2012) diantaranya: (a) Peraturan perundang-undangan yang diterapkan; (b) Jenis kontrak (c) Sumber dana; (d) Metoda pengadaan (e) Nilai kontrak; dan (f) Standar-standar Nasional Indonesia. Ketentuan pokok dalam penyusunan dokumen pengadaan antara lain: (1) Dokumen pengadaan disiapkan panitia atau pejabat pengadaan dan disahkan pengguna barang atau jasa; (2) Isi harus lengkap dan jelas, serta tidak menimbulkan penafsiran jamak (multi tafsir); (3) Perubahan (adendum) dokumen diperkenankan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### **5. Uang Persediaan**

Bawono dan Novelsyah (2011) menjelaskan uang persediaan merupakan

kerja dari BUD kepada Bendahara Pengeluaran yang dapat penggantiananya (*revolving*). Uang persediaan dipergunakan untuk



membiyai kegiatan operasional sehari – hari Satker dan membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. Uang persediaan hanya digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perkantoran yang tidak mungkin dilaksanakan dengan pembayaran secara langsung atau dapat diartikan kegiatan yang sifatnya insidental/mendesak. Hal ini wajib dipahami oleh pengelola keuangan baik KPA, PPK, PPTK, PP SPM dan Bendahara Pengeluaran. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

Ganti uang persediaan yang selanjutnya disingkat GUP adalah permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. Penggunaan atas UP ini nantinya akan dibayar ke kas daerah melalui Ganti Uang Persediaan (GUP). Undang-Undang yang mendasari mengenai GUP ini diantaranya adalah Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Sedangkan Tambahan Uang Persediaan (TUP) adalah uang yang diberikan kepada satker untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan. Syarat dalam pengajuan TUP yaitu untuk memenuhi kebutuhan yang

mendesak atau tidak dapat ditunda, digunakan paling lama satu bulan sejak P2D diterbitkan dan apabila tidak habis digunakan dalam satu bulan sisa



dana yang ada pada bendahara, harus disetor ke Rekening Kas Negara kecuali mendapatkan dispensasi perpanjangan waktu pertanggungjawaban TUP lebih dari satu bulan dari Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

## 2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Judul dan Peneliti	Analisis Data	Hasil Penelitian
1. Analisa faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran Pada satuan Kerja lingkup Pembayaran KPPN Kediri (Priatno, 2013)	Analisis faktor dan regresi logistik	Menghasilkan dua faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada satuan kerja lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara yaitu faktor perencanaan dan faktor pengadaan Barang dan jasa, serta Faktor administrasi dan SDM Yang tidak memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran pada satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Makale.
2. Analisis keterlambatan penyerapan anggaran belanja satuan Kerja kementerian negara/lembaga TA 2010 di wilayah pembayaran KPPN Pekanbaru Miliasih (2012)	Tabel analisis dengan <i>cross Tabulation</i>	Menghasilkan dua faktor utama yang menyebabkan keterlambatan penyerapan anggaran belanja yaitu kebijakan teknis dan kultur pengelolaan anggaran di satuan kerja.
3. Melakukan penelitian terhadap faktor-fakto yang mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran belanja pad satuan kerja Kementerian/Lembag di wilayah Jakarta atas 97 (Herriyanto, 2012)	Analisis faktor eksploratori ( <i>Eksploratory Factor Analysis-EFA</i> )	Menghasilkan lima faktor utama yang terbentuk yaitu faktor perencanaan, Administrasi, SDM, Dokumen Pengadaan, dan Ganti Uang Persediaan.
or-faktor penyebab mpukan anggaran belanja	Analisis faktor	Menghasilkan empat faktor diantaranya faktor



<b>Judul dan Peneliti</b>	<b>Analisis Data</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
diakhir tahun anggaran pada saruan kerja di wilayah KPPN Kediri Kuswoyo (2011)		perencanaan anggaran, faktor pelaksanaan anggaran, faktor pengadaan barang dan jasa, dan faktor internal

